



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 12675-12686

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Peran Informasi Akuntansi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan Strategis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) di Dinas Sosial Kota Kupang

Endri Umbu Awang, Yohanes Demu, Maria Prudensiana Leda Muga
Universitas Nusa Cendana Kupang
endriumbua@gmail.com

Abstrak

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) di Kota Kupang masih menghadapi berbagai permasalahan dalam proses penentuan penerima bantuan, seperti ketidakakuratan data, keterbatasan waktu verifikasi, serta pergantian data penerima tanpa verifikasi lanjutan yang berpotensi menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengambilan keputusan strategis yang didukung oleh informasi akuntansi manajemen yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan strategis penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) di Dinas Sosial Kota Kupang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan, operator sistem bantuan sosial, dan masyarakat penerima manfaat. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi akuntansi manajemen berperan penting dalam mendukung perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis penyaluran BLTS. Penggunaan sistem seperti DTKS, SIKS, dan Siskeudes membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta ketepatan sasaran penyaluran bantuan. Pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa ketidakakuratan data, keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital petugas, dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Diperlukan penguatan digitalisasi sistem, peningkatan kapasitas SDM, dan pemutakhiran data secara berkala agar penyaluran BLTS lebih efektif dan tepat sasaran

Kata kunci: Informasi Akuntansi Manajemen, Pengambilan Keputusan Strategis, Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS)

1. Latar Belakang

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) di Kota Kupang menunjukkan dinamika yang cukup kompleks dalam praktiknya. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Kupang, jumlah calon penerima BLTS untuk periode Oktober-Desember tahun 2025 mencapai 41.307 orang. Dari jumlah tersebut, ada sebanyak 16.620 data diverifikasi oleh pemerintah daerah, sementara sisanya diverifikasi oleh Kementerian Sosial. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak seluruh calon penerima dinyatakan layak, di mana hanya 12.568 orang yang memenuhi kriteria, sementara sebagian lainnya dinyatakan tidak layak atau tidak terverifikasi. Berikut disajikan progres terpadu pendataan dan verifikasi calon penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Tahun 2025 di Kota Kupang pada Tabel 1. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penentuan penerima bantuan tidaklah sederhana, melainkan melibatkan berbagai tahapan yang membutuhkan ketelitian dan pertimbangan yang matang.

Berdasarkan data progres terakhir Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) di Kota Kupang untuk periode Oktober-Desember Tahun 2025, dapat diketahui bahwa total calon penerima bantuan yang tercatat berjumlah 41.307 orang. Proses verifikasi data calon penerima tersebut dilakukan secara terpisah oleh dua instansi Bappenas (2022), yaitu Pemerintah Kota Kupang dan Kementerian Sosial. Dari keseluruhan data, ada sebanyak 16.620 data telah diverifikasi oleh Pemerintah Kota, sementara 24.687 data lainnya diverifikasi oleh Kementerian Sosial.

Tabel 1. Progres Terakhir BLTS Tahun 2025 di Kota Kupang

JUMLAH	KETERANGAN
41.307	Total calon penerima BLTS periode Oktober-Desember 2025
16.620	Data calon penerima diverifikasi oleh Pemerintah Kota
24.687	Data calon penerima diverifikasi oleh Kementerian Sosial
16.620	Data calon penerima diverifikasi oleh Pemerintah Kota
14.633	Data yang telah selesai diverifikasi
1.987	Data yang tidak terverifikasi
1.332	Usulan penggantian dari data tidak terverifikasi (tanpa verifikasi lanjutan)
12.568	Calon penerima dinyatakan layak menerima BLTS
2.065	Calon penerima dinyatakan tidak layak menerima BLTS
14.633	Data yang telah selesai diverifikasi

Sumber: Dinas Sosial Kota Kupang, 2026.

Berdasarkan Tabel 1 juga menunjukkan Proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan di Kota Kupang, juga menghadapi berbagai tantangan Sumarto (2020), seperti ketidakakuratan data, keterbatasan waktu, serta adanya usulan penggantian data tanpa verifikasi lanjutan. Hal ini menunjukkan adanya potensi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengambilan keputusan dalam program BLTS memerlukan dukungan informasi yang kuat dan dapat diandalkan, agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Terdapat juga pergantian data calon penerima BLTS dari masyarakat yang dinilai kriteria sudah tidak layak menerima bantuan kepada calon penerima baru yang diusulkan oleh pihak kelurahan maupun masyarakat setempat. Pergantian tersebut biasanya dilakukan karena penerima sebelumnya dianggap sudah memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik, pindah domisili, desil naik, meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Proses pengusulan pergantian data tersebut dalam beberapa kasus tidak disertai dengan verifikasi lanjutan secara langsung di lapangan. Data penerima baru hanya berdasarkan usulan tanpa dilakukan pengecekan kembali mengenai kondisi ekonomi dan kelayakan calon penerima bantuan. Akibatnya, data penerima bantuan berisiko kembali tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di masyarakat karena penerima pengganti belum tentu memenuhi kriteria penerima BLTS. Keadaan ini dapat menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran, menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat, serta mempengaruhi efektivitas penyaluran bantuan sosial di Kota Kupang.

Kriteria calon penerima BLTS di Dinas Sosial Kota Kupang ditetapkan berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Todaro & Smith, (2020), yaitu rumah tangga miskin atau rentan miskin yang memiliki penghasilan rendah dan yang memiliki penghasil tidak tetap, memiliki tanggungan keluarga, tidak berstatus sebagai ASN/TNI/Polri atau pegawai tetap, serta diprioritaskan bagi yang belum menerima bantuan sosial lain, dan wajib terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maupun hasil pendataan pemerintah daerah serta lolos proses verifikasi dan validasi, adapun alasan mengapa dari sekian banyak masyarakat Kota Kupang, yang ditetapkan sebagai calon penerima BLTS periode Oktober-Desember tahun 2025, karena adanya keterbatasan anggaran serta penerapan proses seleksi yang ketat melalui verifikasi berlapis oleh pemerintah kota dan Kementerian Sosial guna memastikan bantuan tepat sasaran, sehingga hanya masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria kemiskinan dan kerentanan yang dinyatakan layak, sementara data yang tidak valid, tidak memenuhi syarat, atau terduplikasi dieliminasi atau digantikan demi menjaga keadilan dan efektivitas penyaluran bantuan.

Penerima BLTS di Dinas Sosial Kota Kupang tersebut sangat berkaitan erat dengan, peran informasi akuntansi manajemen Hall (2010), karena seluruh proses penetapan penerima bantuan merupakan hasil dari penggunaan informasi akuntansi manajemen yang relevan, seperti data anggaran yang tersedia, data biaya penyaluran, serta informasi sosial ekonomi masyarakat yang telah diolah menjadi dasar perencanaan, pengendalian, dan pengambilan Keputusan, melalui informasi tersebut, pihak Dinas Sosial dapat melakukan analisis prioritas, menyeleksi masyarakat yang paling membutuhkan, serta memastikan bahwa alokasi dana BLTS digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, sehingga keputusan strategis yang diambil mulai dari penentuan kriteria, jumlah penerima, hingga proses verifikasi benar-benar didukung oleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengambilan keputusan strategis menjadi hal yang sangat penting Bryson (2018), bagi pemerintah daerah. Keputusan terkait siapa yang berhak menerima bantuan, bagaimana proses verifikasi dilakukan, serta strategi penyaluran yang digunakan merupakan bagian dari keputusan strategis yang memiliki dampak langsung terhadap

keberhasilan program. Keputusan strategis merupakan keputusan yang menentukan arah dan efektivitas suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Menghadapi berbagai tantangan dalam proses pengambilan keputusan, diperlukan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu Hall (2010). Dalam hal ini informasi akuntansi manajemen memiliki peran penting. Informasi ini tidak hanya mencakup data keuangan, tetapi juga informasi non-keuangan yang berkaitan dengan operasional dan kinerja program. Informasi yang dihasilkan digunakan untuk perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja organisasi. Penggunaan informasi akuntansi manajemen terbukti dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Praktik sektor publik menunjukkan bahwa pemanfaatan informasi akuntansi manajemen masih belum optimal. Konsep New Public Management Hood (1991:89), menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, serta penggunaan informasi kinerja sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kenyataannya penggunaan informasi lebih sering berfokus pada pemenuhan pelaporan formal dibandingkan pemanfaatannya untuk mendukung fungsi manajerial secara maksimal.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan informasi dengan penggunaannya dalam praktik Peters (2015). Hal ini juga tercermin dalam berbagai penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti dampak program bantuan sosial, dibandingkan dengan bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan. Terdapat research gap yang perlu dikaji lebih dalam, khususnya terkait peran informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Kota Kupang, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Program BLTS merupakan salah satu bentuk kebijakan perlindungan sosial yang dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi dampak ekonomi akibat krisis. Dalam Kebijakan publik, keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh proses implementasinya, termasuk bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan di tingkat daerah.

Pada tahap implementasi, sering muncul kesenjangan antara kebijakan yang dirancang di tingkat pusat dan pelaksanaannya di daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal yang dihadapi. Perbedaan kapasitas serta kondisi sosial ekonomi turut menimbulkan variasi dalam pelaksanaan kebijakan. Kondisi ini terlihat dari adanya perbedaan tingkat efektivitas penyaluran bantuan sosial di berbagai daerah. Berbagai permasalahan seperti akurasi data penerima manfaat, tekanan waktu, serta kompleksitas koordinasi antar lembaga juga menjadi tantangan dalam implementasi program bantuan sosial. Dalam sistem informasi, kualitas keputusan sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang digunakan. Simon menjelaskan bahwa pengambil keputusan seringkali bekerja dalam kondisi keterbatasan informasi dan waktu. Simon (1997). Apabila dilihat dalam lingkup yang lebih luas, program bantuan sosial merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang masih menjadi tantangan utama di berbagai negara. Dalam perspektif global, kemiskinan merupakan fenomena struktural yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, serta ketimpangan distribusi pendapatan Todaro & Smith, (2020). Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat berada dalam situasi rentan dan membutuhkan intervensi pemerintah. Berbagai negara menerapkan kebijakan fiskal melalui program perlindungan sosial untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Intervensi pemerintah melalui pengeluaran publik dan bantuan sosial merupakan langkah penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Konsep welfare state menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Berbagai studi menunjukkan bahwa program bantuan sosial, khususnya bantuan tunai, mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga dan mengurangi tingkat kemiskinan dalam jangka pendek. Dapat disimpulkan bahwa fenomena yang terjadi di Kota Kupang merupakan bagian dari dinamika yang lebih luas dalam implementasi kebijakan bantuan sosial. Kompleksitas yang terjadi di tingkat daerah mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam mengelola program yang bersifat nasional bahkan global. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran informasi akuntansi manajemen dalam mendukung pengambilan keputusan strategis, sehingga dapat meningkatkan efektivitas program bantuan sosial secara keseluruhan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam peran informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan strategis penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) di Dinas Sosial Kota Kupang. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan program BLTS, yaitu Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan,

Operator/Admin Sistem Bantuan Sosial, serta penerima manfaat bantuan sosial. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan keuangan, peraturan terkait, dan berbagai literatur yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka dengan menerapkan teknik triangulasi untuk meningkatkan validitas data. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mulai Januari 2026 hingga penelitian selesai.

3. Hasil dan Diskusi

Konteks dan Proses Penyaluran BLTS di Kota Kupang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) di Kota Kupang mengacu pada regulasi pemerintah pusat dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis utama. Kriteria penerima meliputi masyarakat miskin atau rentan miskin yang berada pada desil 1–4, memiliki penghasilan rendah atau tidak tetap, memiliki tanggungan keluarga, tidak menerima bantuan sosial lain, serta telah melalui proses verifikasi dan validasi data. Dalam pelaksanaannya, proses penyaluran melibatkan berbagai pihak, yaitu Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kota Kupang, pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, dan petugas lapangan.

Tahapan penyaluran BLTS dimulai dari penetapan kebijakan dan alokasi anggaran oleh pemerintah pusat, penyediaan data penerima melalui DTKS, verifikasi dan validasi data oleh Dinas Sosial bersama pemerintah kelurahan, penetapan penerima manfaat, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat. Seluruh tahapan dilakukan secara berjenjang dengan dukungan sistem informasi untuk memastikan data penerima terintegrasi dan bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Meskipun demikian, penelitian menemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan program BLTS, antara lain ketidakakuratan dan keterlambatan pembaruan data DTKS, duplikasi data penerima, keterbatasan petugas lapangan, kendala koordinasi antarlembaga, serta masalah teknis pada sistem informasi. Dari sisi penerima manfaat, proses verifikasi yang cukup lama dan kendala administrasi terkadang menyebabkan keterlambatan pencairan bantuan. Namun demikian, mekanisme pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial telah dikelola dengan prinsip akuntabilitas untuk mendukung ketepatan jumlah dan ketepatan waktu penyaluran bantuan.

Praktik dan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen (IAM)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BLTS di Dinas Sosial Kota Kupang didukung oleh sistem informasi akuntansi manajemen yang terintegrasi. Pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintah melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan sistem keuangan daerah. Seluruh aliran dana dicatat secara berjenjang mulai dari proses penganggaran, pencairan, hingga penyaluran kepada penerima manfaat. Pelaporan keuangan dilakukan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Pengendalian internal diterapkan melalui prosedur otorisasi berjenjang, pemisahan fungsi antara perencanaan, pelaksana, dan pemeriksa, serta penggunaan audit trail digital dalam pengelolaan data penerima manfaat. Setiap perubahan data maupun realisasi anggaran harus melalui proses verifikasi dan persetujuan sesuai kewenangan yang berlaku. Mekanisme tersebut bertujuan untuk meminimalkan risiko kesalahan dan penyimpangan serta meningkatkan transparansi pengelolaan program BLTS.

Selain itu, integrasi antara data keuangan dan data penerima manfaat menjadi faktor penting dalam menjaga ketepatan sasaran penyaluran bantuan. Data penerima yang telah diverifikasi dalam DTKS dan SIKS menjadi dasar pencairan dana sehingga bantuan hanya diberikan kepada penerima yang memenuhi kriteria. Integrasi sistem juga mendukung transparansi dan akuntabilitas karena seluruh proses dapat ditelusuri melalui sistem informasi. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, sinkronisasi data, dan pembaruan data penerima yang belum optimal.

Peran Informasi dalam Pengambilan Keputusan Strategis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi biaya berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan strategis terkait penyaluran BLTS. Dinas Sosial Kota Kupang memanfaatkan data biaya operasional, seperti biaya verifikasi, transportasi petugas, dan distribusi bantuan, untuk mengevaluasi efisiensi penyaluran di setiap wilayah. Informasi tersebut dipadukan dengan data kemiskinan dari DTKS sehingga manajemen dapat menentukan prioritas wilayah berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat dan efisiensi penggunaan anggaran. Dengan demikian, alokasi sumber daya dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain informasi biaya, data penerima manfaat juga menjadi dasar utama dalam menjamin ketepatan sasaran serta mengevaluasi keberlanjutan program. Melalui DTKS dan proses verifikasi serta validasi berlapis, Dinas Sosial dapat memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Data penerima juga digunakan untuk memantau perubahan kondisi ekonomi masyarakat dan menilai kelayakan penerima secara berkala. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan kebijakan, penyesuaian sasaran program, dan pengambilan keputusan strategis pada periode berikutnya.

Penelitian juga menemukan bahwa informasi akuntansi manajemen berperan dalam mitigasi risiko penyelewengan dana bantuan. Integrasi data penerima dengan sistem keuangan daerah, penerapan audit trail digital, rekonsiliasi data secara berkala, serta prosedur otorisasi berjenjang membantu meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas program. Pemanfaatan sistem informasi tersebut memungkinkan deteksi dini terhadap ketidaksesuaian data maupun potensi penyimpangan, sehingga mendukung transparansi, efektivitas pengendalian internal, dan kualitas pengambilan keputusan strategis dalam penyaluran BLTS.

Persepsi dan Evaluasi terhadap Kualitas Informasi Akuntansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan strategis pada program BLTS di Dinas Sosial Kota Kupang. Informasi mengenai alokasi anggaran, realisasi belanja, biaya operasional, dan sisa anggaran digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efisiensi penyaluran bantuan serta menentukan prioritas wilayah penerima. Selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian, laporan keuangan juga menjadi sarana akuntabilitas publik melalui proses pelaporan dan audit yang dilakukan secara berkala.

Kualitas informasi akuntansi dinilai telah mendukung pengelolaan program BLTS, terutama dari aspek ketepatan waktu, keandalan, dan keakuratan data. Penyajian laporan secara periodik, proses rekonsiliasi data, verifikasi berlapis, serta integrasi data penerima melalui DTKS dan SIKS membantu memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan bersifat valid dan dapat dipercaya. Ketersediaan informasi yang tepat waktu dan akurat memungkinkan manajemen melakukan evaluasi program serta mengambil tindakan korektif apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan.

Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya kendala yang berkaitan dengan literasi digital petugas dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Beberapa petugas masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi pendataan dan pelaporan, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan input, keterlambatan pembaruan data, dan ketidakakuratan informasi. Selain itu, keterbatasan akses internet di beberapa wilayah turut memengaruhi kelancaran pengelolaan data. Kondisi tersebut berdampak pada tingkat transparansi dan akuntabilitas program, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta dukungan infrastruktur teknologi yang lebih memadai.

Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen ke Depan

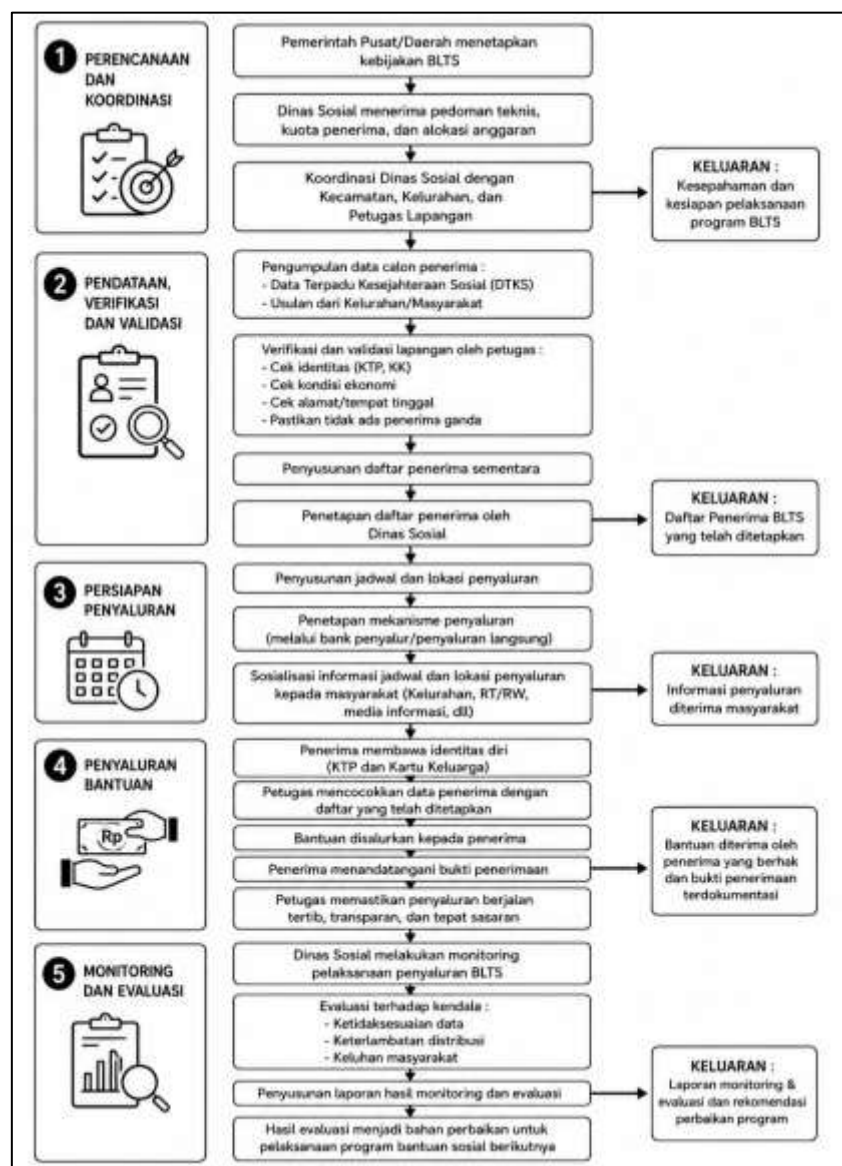
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Kupang terus melakukan pengembangan sistem informasi akuntansi manajemen melalui digitalisasi dan integrasi berbagai sistem yang mendukung penyaluran BLTS. Integrasi antara DTKS, SIKS, data kependudukan dari Dukcapil, dan sistem keuangan daerah memungkinkan proses verifikasi, validasi, pelaporan, serta pencairan bantuan dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Penggunaan sistem yang terintegrasi juga membantu mengurangi duplikasi data, meningkatkan transparansi, serta mendukung akuntabilitas dalam pengelolaan program bantuan sosial.

Selain itu, pengembangan dashboard pemantauan real-time dipandang sebagai kebutuhan penting untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Dashboard ini diharapkan mampu menyediakan informasi terkini mengenai jumlah penerima manfaat, status verifikasi, realisasi anggaran, serta berbagai kendala yang terjadi di lapangan. Dengan tersedianya informasi secara real-time, manajemen dapat melakukan tindakan korektif lebih cepat, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memperkuat transparansi program kepada masyarakat.

Penelitian juga menemukan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem pengendalian manajemen merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem informasi akuntansi manajemen. Upaya yang dilakukan meliputi pelatihan rutin bagi petugas dan operator sistem, penguatan mekanisme otorisasi, pemisahan fungsi, audit internal, serta pemanfaatan audit trail digital. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi petugas, meminimalkan risiko kesalahan dan penyimpangan, serta memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran penyaluran BLTS di masa mendatang.

Pembahasan

SOP Penyaluran BLTS



Gambar 1. Mekanisme Penyaluran BLTS

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10457>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) dimulai dari tahap perencanaan dan penetapan kebijakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada tahap ini, Dinas Sosial menerima pedoman teknis, kuota penerima bantuan, serta alokasi anggaran yang menjadi dasar pelaksanaan program. Selanjutnya dilakukan koordinasi antara pihak Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan petugas lapangan guna memastikan proses penyaluran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tahap berikutnya adalah pendataan calon penerima bantuan. Data masyarakat diperoleh melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta usulan dari pemerintah kelurahan atau masyarakat setempat. Setelah data terkumpul, petugas melakukan verifikasi dan validasi secara langsung di lapangan untuk memastikan bahwa calon penerima benar-benar memenuhi kriteria penerima BLTS. Proses ini meliputi pengecekan identitas, kondisi ekonomi keluarga, alamat tempat tinggal, serta memastikan tidak terjadi penerima ganda. Hasil verifikasi kemudian disusun dalam daftar penerima sementara dan dilaporkan kepada pihak terkait untuk dilakukan penetapan.

Setelah data penerima ditetapkan, Dinas Sosial menyusun jadwal penyaluran bantuan serta menentukan mekanisme distribusi dana, baik melalui bank penyalur maupun penyaluran langsung. Informasi mengenai jadwal dan lokasi penyaluran disampaikan kepada masyarakat melalui pemerintah kelurahan, RT/RW, maupun media informasi lainnya agar penerima mengetahui waktu pelaksanaan penyaluran bantuan. Pada tahap penyaluran, penerima bantuan diwajibkan membawa identitas diri seperti KTP dan kartu keluarga sebagai bukti penerimaan. Petugas penyalur melakukan pencocokan data penerima dengan daftar yang telah ditetapkan sebelum bantuan diberikan. Setelah bantuan diterima, penerima diminta menandatangani bukti penerimaan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi. Dalam proses ini, petugas juga memastikan bahwa penyaluran berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran.

Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Dinas Sosial melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran BLTS untuk mengetahui apakah bantuan telah diterima oleh masyarakat yang berhak. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap kendala yang ditemukan. Selama proses penyaluran, seperti ketidaksesuaian data, keterlambatan distribusi, atau keluhan masyarakat. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan program bantuan sosial berikutnya agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Perbandingan Hasil Penelitian dengan SOP Penyaluran BLTS

Berdasarkan hasil penelitian ini di Dinas Sosial Kota Kupang, pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) pada umumnya telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. SOP mengatur bahwa penyaluran dimulai dari perencanaan dan penetapan kebijakan oleh pemerintah pusat dan daerah, kemudian dilanjutkan dengan koordinasi antarinstansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan tersebut telah dilaksanakan melalui penetapan kebijakan oleh Kementerian Sosial, penyediaan DTKS, serta koordinasi Dinas Sosial dengan pemerintah kelurahan dan pihak terkait.

Pada tahap pendataan penerima, SOP menjelaskan bahwa data bersumber dari DTKS dan usulan masyarakat yang kemudian diverifikasi serta divalidasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Kupang menggunakan DTKS sebagai sumber utama data penerima dan melakukan verifikasi bersama pemerintah kelurahan untuk memastikan kesesuaian identitas dan kondisi sosial ekonomi calon penerima.

Kesesuaian juga terlihat pada tahap penetapan penerima bantuan. SOP mengatur bahwa hasil verifikasi dan validasi menjadi dasar penetapan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon penerima yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai penerima BLTS dan menjadi dasar pelaksanaan penyaluran bantuan.

Pada tahap penyaluran, SOP mengatur penyusunan jadwal, penyampaian informasi kepada masyarakat, serta verifikasi identitas penerima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh informasi melalui aparat kelurahan dan wajib menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga sebelum menerima bantuan. Proses tersebut telah berjalan sesuai dengan SOP.

SOP juga mengharuskan adanya bukti penerimaan bantuan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima manfaat diwajibkan menandatangani daftar hadir atau bukti penerimaan setelah proses verifikasi identitas dilakukan oleh petugas.

Meskipun sebagian besar tahapan telah sesuai dengan SOP, penelitian menemukan adanya praktik yang belum dijelaskan secara rinci dalam SOP, yaitu penggunaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS), DTKS, dan aplikasi keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi tersebut membantu proses verifikasi, pengelolaan data, pengawasan, dan pelaporan sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program.

Perbedaan lainnya ditemukan pada hambatan pelaksanaan program. SOP hanya menjelaskan kendala secara umum, sedangkan hasil penelitian menunjukkan adanya masalah seperti data DTKS yang belum mutakhir, duplikasi data penerima, keterbatasan petugas lapangan, gangguan jaringan internet, serta rendahnya literasi digital sebagian petugas.

Pada tahap monitoring dan evaluasi, hasil penelitian menunjukkan kesesuaian dengan SOP. Dinas Sosial melakukan pengawasan, evaluasi berkala, dan rekonsiliasi data penerima manfaat. Selain itu, monitoring juga didukung oleh sistem informasi yang memudahkan pelacakan data dan realisasi penyaluran bantuan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan BLTS di Dinas Sosial Kota Kupang telah berjalan sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam SOP. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya perkembangan dalam penggunaan teknologi informasi, integrasi data, dan sistem pengendalian yang belum diatur secara rinci dalam SOP. Oleh karena itu, SOP perlu diperbarui agar lebih sesuai dengan kondisi pelaksanaan BLTS saat ini dan dapat mendukung efektivitas program bantuan sosial di masa mendatang.

Konteks dan Proses Penyaluran BLTS

Hasil wawancara dengan informan, bahwa kebijakan dan kriteria penerima BLTS di Kota Kupang sepenuhnya mengacu pada regulasi nasional dengan DTKS sebagai basis data utama. Implementasinya dihadapkan pada sejumlah permasalahan kritis: ketidakakuratan data DTKS, perubahan status ekonomi penerima yang mendadak dan tidak terekam, keterbatasan petugas lapangan, duplikasi data, kesalahan input, koordinasi antarlembaga yang lambat, serta koneksi sistem tidak stabil. Penerima manfaat secara konkret menyatakan bahwa nama yang sudah didata kelurahan sering tidak masuk sistem, proses verifikasi berlarut-larut, dan pencairan tidak tepat waktu. Permasalahan ini menunjukkan adanya *implementation gap* antara kebijakan pusat yang ideal dan realitas di lapangan.

Keterkaitan penelitian ini dengan Teori Akuntansi Manajemen Sektor Publik Mardiasmo (2009) menekankan bahwa organisasi publik harus menciptakan *public value* melalui ketepatan sasaran, jumlah, dan waktu. Dalam BLTS, ketidakakuratan DTKS menyebabkan *targeting error*, di mana masyarakat miskin terlewat sementara yang tidak berhak terdaftar ini bertentangan dengan prinsip *value for money*. Teori Pengambilan Keputusan Simon (1997) menjelaskan bahwa pengambil keputusan bekerja dalam *bounded rationality*: informasi tidak lengkap, waktu terbatas, tekanan sosial tinggi. Kepala Dinas dan Kepala Bidang cenderung menggunakan pendekatan *satisficing* (mencari solusi cukup memadai), misalnya menerima usulan penggantian data tanpa verifikasi lanjutan, yang berisiko terhadap ketepatan sasaran. Teori *Good Governance* Speth (1997) menuntut transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Hambatan koordinasi antarlembaga menunjukkan lemahnya prinsip responsivitas. *Institutional Theory* Lapsley (2009) melihat bahwa tekanan koersif dari pemerintah pusat memaksa daerah mengikuti standar nasional, namun kapasitas daerah tidak sepadan, sehingga terjadi *implementation gap*. Tekanan mimetik mendorong Dinas Sosial meniru praktik daerah lain tanpa kesiapan infrastruktur.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Marpupi & Darmayanti, (2024) membuktikan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi desa berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penyaluran BLT Dana Desa (*koefisien regresi*). Setiap peningkatan kualitas sistem informasi meningkatkan ketepatan sasaran. Di Kota Kupang, kelemahan DTKS menjadi akar masalah. Suryahadi & Yumna, (2021) menegaskan bahwa tantangan utama bantuan sosial di Indonesia adalah kualitas basis data yang tidak mutakhir, diperparah dinamika kemiskinan cepat. Mumtahanah *et al.*, (2025) menemukan bahwa akuntansi manajerial yang baik membantu pengambilan keputusan berbasis data, tetapi jika data dasarnya cacat, keputusan tetap berisiko tinggi. Sementara itu, mekanisme pendanaan yang akuntabel dan tepat waktu mencerminkan prinsip *Good Governance*, namun keterlambatan pencairan yang dikeluhkan penerima manfaat menunjukkan bahwa prosedur formal tidak selalu menjamin efektivitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan penyaluran BLTS di Kota Kupang secara kebijakan telah mengacu pada standar nasional yang baik, namun permasalahan operasional ketidakakuratan DTKS, perubahan status ekonomi mendadak, keterbatasan petugas, koordinasi lambat menyebabkan *targeting error* dan keterlambatan pencairan.

Teori *bounded rationality* dan *institutional theory* menjelaskan kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi daerah. Implikasinya, Dinas Sosial perlu memprioritaskan pemutakhiran DTKS secara berkala *idealnya real-time*, peningkatan koordinasi lintas lembaga melalui forum rutin, digitalisasi verifikasi lapangan dengan aplikasi mobile *offline-first*, serta penambahan petugas verifikasi di wilayah dengan kepadatan kemiskinan tinggi.

Praktik dan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen (IAM)

Hasil wawancara dengan informan, bahwa Dinas Sosial Kota Kupang menggunakan SIKS (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial) dan Siskeudes (aplikasi keuangan daerah). Secara prosedural, pencatatan dan pelaporan telah mengacu pada standar akuntansi pemerintah dengan prinsip akuntabel dan berjenjang. Laporan keuangan disusun secara berkala (bulanan, triwulan) dan diaudit. Pengendalian internal dilakukan melalui otorisasi berjenjang (kepala bidang, sekretaris dan kepala dinas), pemisahan fungsi (perencana, pelaksana, pemeriksa), serta audit trail digital. Permasalahan teknis yang diungkap operator sistem sangat signifikan: data DTKS tidak mutakhir, duplikasi data sering terjadi, kesalahan input dari petugas lapangan berulang, sinkronisasi antara SIKS dan Siskeudes belum optimal, akses internet terbatas di wilayah terpencil, dan petugas senior kesulitan menggunakan aplikasi. Penerima manfaat merasakan dampaknya ketika data KTP/KK tidak cocok dengan sistem atau nama yang sudah didata tidak muncul saat pencairan.

Keterkaitan penelitian ini dengan Teori Akuntansi Manajemen Sektor Publik Anthony (2014) menekankan bahwa sistem pengendalian manajemen harus memastikan sumber daya digunakan secara efektif dan efisien. Di sini, efisiensi terganggu karena petugas harus mengulang verifikasi akibat kesalahan input, dan duplikasi data menyebabkan pemborosan waktu. Teori *Good Governance* Speth (1997) menuntut transparansi dan akuntabilitas; audit trail digital sudah baik, tetapi kendala teknis mengurangi transparansi karena data tidak mutakhir. *Institutional Theory* Lapsley (2009) melihat bahwa prosedur ketat dan audit trail berfungsi sebagai *legitimacy tool* untuk memenuhi tuntutan BPK dan Kemensos, namun legitimasi formal tidak menjamin efektivitas substantif. Tekanan normatif dari lembaga pengawas mendorong kepatuhan prosedural, tetapi belum diimbangi dengan kapasitas SDM yang memadai. *New Public Management* Hood (1991) yang menekankan efisiensi melalui teknologi informasi, di Dinas Sosial baru sebatas adopsi, belum optimal karena kendala infrastruktur.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Siagian et al., (2025) secara kuantitatif membuktikan bahwa SIAM berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengambilan keputusan strategis. Artinya, lebih dari setengah kualitas keputusan di Dinas Sosial ditentukan oleh seberapa baik SIAM bekerja. Namun, jika data yang masuk ke SIAM tidak akurat (karena kesalahan input petugas), maka *output* laporan keuangan dan rekomendasi prioritas wilayah juga akan bias. Penelitian Ikhsan Nurfahmi (2026) menegaskan bahwa akuntansi manajemen berfungsi dalam manajemen risiko dan transparansi, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas data sumber. Penelitian Lubis et al., (2025) pada perusahaan digital Tokopedia dan Facebook menunjukkan bahwa keberhasilan SIAM memerlukan tata kelola risiko dan etika, serta integrasi data *real-time*. Di Dinas Sosial, integrasi sudah ada tetapi belum *real-time* dan masih rapuh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan Sistem IAM di Dinas Sosial secara prosedural telah memenuhi standar akuntansi pemerintah dengan pengendalian internal ketat dan audit trail digital. Namun, permasalahan pada kualitas data sumber (ketidakmutakhiran, duplikasi, kesalahan input) dan infrastruktur (akses internet, sinkronisasi) menyebabkan efektivitas IAM belum optimal. Legitimasi formal belum menjamin efektivitas substantif. Implikasinya, Dinas Sosial harus meningkatkan kualitas data sumber melalui pelatihan intensif petugas lapangan, penyediaan aplikasi mobile yang dapat beroperasi *offline*, serta penguatan sinkronisasi *real-time* antara SIKS, Siskeudes, dan Dukcapil. Selain itu, perlu ada mekanisme validasi otomatis pada saat input data untuk mencegah duplikasi dan kesalahan format.

Peran Informasi dalam Pengambilan Keputusan Strategis

Hasil wawancara dengan infoman, bahwa peran informasi akuntansi manajemen dalam tiga keputusan strategis: Penentuan prioritas wilayah berdasarkan biaya operasional verifikasi, transportasi, distribusi dan konsentrasi kemiskinan. Evaluasi keberlanjutan program melalui data penerima kelayakan, perubahan status ekonomi, dampak bantuan. Mitigasi risiko penyelewengan dana melalui rekonsiliasi, audit trail, otorisasi berjenjang, dan pencocokan data KTP/KK online. Permasalahan yang muncul data biaya bersifat historis, tidak mencerminkan kondisi terkini evaluasi lebih berfokus pada *output* apakah bantuan tersalurkan daripada *outcome* apakah kemiskinan berkurang,

belum ada indikator baku untuk menilai kewajaran biaya operasional per wilayah, perubahan status ekonomi penerima sering terdeteksi terlambat karena verifikasi hanya setiap beberapa bulan; risiko penyelewengan internal (*mark-up* biaya, kolusi) belum sepenuhnya terpetakan.

Keterkaitan penelitian ini dengan Teori Akuntansi Manajemen melalui konsep *cost information* Anthony (2014) mengatakan bahwa informasi biaya harus digunakan untuk efisiensi. Dinas Sosial telah membandingkan biaya per penerima antar kelurahan, namun karena data historis, keputusan yang diambil mungkin tidak tepat untuk kondisi saat ini. Teori *Good Governance* Speth (1997) menuntut efektivitas dan efisiensi; efisiensi biaya tidak boleh mengorbankan efektivitas (misalnya mengabaikan wilayah terpencil dengan biaya tinggi tetapi kemiskinan ekstrem). Teori Pengambilan Keputusan Simon (1997) menjelaskan bahwa dalam kondisi ketidakpastian, manajer menggunakan *heuristic* dan *satisficing*. Keputusan prioritas wilayah yang didasarkan pada data historis dan pepaduan manual adalah bentuk *satisficing*. Konsep *levers of control* Simon (1994) menyatakan bahwa informasi harus digunakan sebagai sistem kendali diagnostik. Evaluasi berkala terhadap kelayakan penerima adalah bentuk kendali diagnostik, tetapi frekuensinya (bulanan atau triwulan) terlalu jarang untuk menangkap perubahan status ekonomi cepat. *Institutional Theory* Lapsley (2009) melihat bahwa evaluasi berbasis data juga berfungsi untuk memenuhi tekanan normatif dari BPK, namun seringkali bersifat ritualistik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ikhsan Nurfahmi (2026), mengatakan bahwa akuntansi manajemen berfungsi dalam perencanaan dan pengendalian biaya serta manajemen risiko. Temuan di Dinas Sosial mengonfirmasi fungsi tersebut, tetapi masih terbatas. Penelitian Mumtahanah *et al.*, (2025) menemukan bahwa analisis biaya membantu identifikasi pemborosan dan peluang efisiensi di BLTS, analisis biaya per wilayah telah mengidentifikasi kelurahan dengan biaya tinggi dan cakupan rendah, yang menjadi prioritas perbaikan. Penelitian Marpupi & Darmayanti (2024) menekankan bahwa sistem informasi akuntansi yang baik mendukung transparansi dan akuntabilitas, di BLTS, audit trail dan otorisasi berjenjang telah mengurangi risiko penyelewengan besar, tetapi risiko internal masih ada. Penelitian Siagian *et al.*, (2025), menunjukkan bahwa SIAM membantu alokasi sumber daya secara akurat; di BLTS, akurasi alokasi masih terganggu oleh data kemiskinan yang tidak mutakhir.

Dengan demikian, dapat disimpulkan Informasi akuntansi manajemen berperan sentral dalam keputusan prioritas wilayah, evaluasi keberlanjutan, dan mitigasi risiko penyelewengan BLTS. Permasalahan data historis, evaluasi yang lebih berfokus pada *output*, belum adanya indikator baku kewajaran biaya, serta keterlambatan deteksi perubahan status ekonomi menjadi kelemahan utama. Implikasinya, Dinas Sosial perlu mengembangkan indikator efisiensi yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis (misalnya biaya wajar per penerima di wilayah terpencil lebih tinggi), membangun mekanisme pelaporan perubahan status ekonomi secara sukarela oleh warga atau tokoh masyarakat (melalui *hotline* atau aplikasi), serta melakukan *fraud risk assessment* secara berkala dengan melibatkan inspektorat. Evaluasi juga harus diarahkan pada *outcome* (penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan) melalui survei dampak berkala.

Persepsi dan Evaluasi terhadap Kualitas Informasi Akuntansi

Hasil dari wawancara dengan informan, bahwa persepsi manajemen (Kepala Dinas, Kepala Bidang) terhadap laporan keuangan sangat positif, laporan dianggap relevan (memberikan gambaran alokasi, realisasi, biaya per wilayah), andal (melalui rekonsiliasi berkala), dan tepat waktu (disusun bulanan/triwulan). Operator sistem menegaskan bahwa manajemen sangat mengandalkan laporan keuangan yang terintegrasi dengan DTKS/SIKS. Penerima manfaat meskipun tidak memahami teknis, merasakan dampaknya melalui penyaluran teratur dan bukti tanda tangan. Namun, kendala literasi digital petugas lapangan menjadi permasalahan utama: petugas senior kesulitan menggunakan SIKS dan Siskeudes, kesalahan input data sering terjadi, akses internet terbatas di wilayah terpencil, dan perangkat keras tidak memadai. Akibatnya, data tidak mutakhir, audit trail tidak lengkap, dan masyarakat sulit memverifikasi kebenaran data secara transparan. Penerima manfaat secara konkret mengatakan: "nama saya salah input karena petugas kurang teliti, jadi bantuan saya tertunda."

Keterkaitan penelitian ini dengan Teori Akuntansi Manajemen Anthony (2014) menekankan bahwa informasi harus relevan, andal, dan tepat waktu. Di Dinas Sosial, relevansi tinggi, tetapi ketepatan waktu dan keandalan terganggu oleh kendala teknis dan SDM. Teori *Good Governance*, Speth (1997) menuntut transparansi, kurangnya data mutakhir dan audit trail tidak lengkap mengurangi transparansi, sehingga masyarakat tidak bisa mengakses informasi penyaluran secara *real-time*. *Institutional Theory* Lapsley (2009) menjelaskan bahwa implementasi NPM dan sistem akuntansi manajemen di sektor publik sering terjebak pada formalitas (pelaporan periodik) karena kapasitas SDM dan infrastruktur belum memadai. Tekanan mimetik mendorong adopsi teknologi digital tanpa

persiapan matang, menghasilkan *ceremonial implementation*. Teori Pengambilan Keputusan Simon (1997) relevan karena keterlambatan informasi menyebabkan keputusan korektif terlambat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Siagian et al., (2025) secara kuantitatif membuktikan bahwa penggunaan SIAM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas keputusan, tetapi pengaruh itu hanya terwujud jika data berkualitas. Di Dinas Sosial, data tidak selalu berkualitas karena kendala SDM. Penelitian Mumtahanah et al., (2025) mengidentifikasi bahwa resistensi terhadap perubahan dan kebutuhan pelatihan adalah tantangan utama implementasi sistem akuntansi manajerial. Petugas senior yang terbiasa dengan pencatatan manual menunjukkan resistensi, dan kurangnya pelatihan berkelanjutan memperparah kesalahan. Penelitian Ikhsan Nurfaumi (2026), menegaskan bahwa akuntansi manajemen strategis meningkatkan akuntabilitas dalam konteks *good governance*, tetapi akuntabilitas memerlukan transparansi data yang tidak tercapai jika data tidak mutakhir. Penelitian Lubis et al., (2025) menekankan pentingnya *privacy by design* dan audit etika, di Dinas Sosial, audit trail digital sudah ada, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk deteksi dini kesalahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan Persepsi manajemen terhadap laporan keuangan sangat positif relevan, andal, tepat waktu, namun kendala literasi digital petugas lapangan kesulitan menggunakan aplikasi, akses internet terbatas, perangkat tidak memadai menyebabkan data tidak mutakhir dan audit trail tidak lengkap. Akibatnya, transparansi dan akuntabilitas publik menurun. Implikasinya, Dinas Sosial harus melaksanakan pelatihan berkelanjutan yang bersifat *hands-on* dan berulang, menyediakan *helpdesk* teknis mengembangkan standar kompetensi minimal bagi petugas verifikasi dengan sertifikasi, serta memperbaiki infrastruktur jaringan di wilayah terpencil misalnya dengan menyediakan modem dan paket data khusus. Selain itu, perlu dibangun portal publik sederhana bisa melalui SMS atau website ringan agar penerima manfaat dapat mengecek status bantuan secara mandiri, sehingga transparansi meningkat.

Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen ke Depan

Hasil dari wawancara dengan informan, bahwa Dinas Sosial telah memulai agenda pengembangan: digitalisasi dan integrasi sistem (DTKS, Siskeudes, Dukcapil) dengan piloting API untuk sinkronisasi otomatis, pengembangan *dashboard real-time* yang diusulkan oleh seluruh informan, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan rutin dan penguatan sistem pengendalian manajemen. Permasalahan yang masih dihadapi: koneksi internet tidak stabil di wilayah terpencil, sehingga aplikasi mobile tidak dapat digunakan optimal, belum ada solusi *offline-first* untuk verifikasi lapangan, *dashboard real-time* masih dalam tahap wacana, belum ada prototype, pelatihan SDM masih bersifat sporadis, belum berkelanjutan, belum ada mekanisme respons yang jelas terhadap peringatan dini dari *dashboard*, integrasi dengan Dukcapil belum sepenuhnya real-time, masih ada jeda waktu.

Keterkaitan penelitian ini dengan *Institutional Theory* Lapsley (2009) menjelaskan bahwa upaya digitalisasi dan integrasi adalah respons terhadap tekanan koersif (regulasi pusat yang mewajibkan DTKS dan Siskeudes) serta tekanan mimetik meniru praktik terbaik daerah lain. Integrasi dengan Dukcapil sejalan dengan prinsip Teori *Good Governance* Speth (1997) dalam hal akurasi data dan pencegahan duplikasi. Pengembangan *dashboard real-time* merupakan implementasi dari *interactive control systems* Simon (1994), di mana informasi digunakan secara interaktif untuk memicu diskusi strategis dan pembelajaran organisasi. *Dashboard* memungkinkan peringatan dini jika terjadi kejanggalan data, misalnya biaya distribusi per penerima melebihi batas wajar atau frekuensi perubahan data penerima yang mencurigakan. Teori Akuntansi Manajemen Sektor Publik Mardiasmo (2009) menekankan bahwa informasi hanya bermanfaat jika penggunaannya kompeten; oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM adalah fondasi agar digitalisasi tidak sia-sia.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Penelitian Marpupi & Darmayanti (2024) menunjukkan bahwa peningkatan sistem informasi akuntansi secara positif mempengaruhi efektivitas penyaluran BLT. Integrasi yang lebih dalam (misalnya penghubungan langsung dengan data kependudukan yang diperbarui harian), mengurangi kesalahan verifikasi secara drastis. Penelitian Lubis et al., (2025) menegaskan bahwa SIAM yang mengintegrasikan data real-time dan analitik meningkatkan efektivitas keputusan, asalkan didukung oleh tata kelola risiko dan etika. Untuk BLTS, *dashboard real-time* harus dilengkapi dengan mekanisme respons yang jelas (siapa yang bertindak, dalam batas waktu berapa). Penelitian Mumtahanah et al., (2025) menekankan bahwa implementasi sistem akuntansi manajerial yang efektif memerlukan pelatihan dan pengembangan SDM yang berkelanjutan, bukan hanya pelatihan satu kali. Penelitian Siagian et al., (2025), menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi SIAM secara langsung meningkatkan kualitas dan kecepatan pengambilan keputusan strategis. Di Dinas Sosial, peningkatan kapasitas SDM mempercepat adopsi teknologi dan mengurangi kesalahan input.

Dengan demikian, dapat disimpulkan Tiga agenda pengembangan utama-digitalisasi dan integrasi sistem (DTKS, Siskeudes, Dukcapil), pengembangan *dashboard real-time*, serta peningkatan kapasitas SDM dan penguatan pengendalian manajemen, telah dimulai dan memberikan dampak positif awal. Namun, kendala infrastruktur (koneksi internet tidak stabil), belum adanya solusi *offline-first*, pelatihan SDM yang sporadis, serta belum adanya mekanisme respons terhadap *dashboard* masih menjadi tantangan. Implikasinya, Dinas Sosial harus menyeimbangkan investasi teknologi dan investasi manusia. Secara teknis, perlu dikembangkan aplikasi mobile *offline-first* yang dapat menyimpan data sementara dan mensinkronkannya saat sinyal tersedia. Secara kelembagaan, perlu dibangun budaya pembelajaran organisasi di mana kesalahan input dianalisis sebagai bahan pembelajaran, bukan sekadar disalahkan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa informasi akuntansi manajemen memiliki Peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan strategis penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) di Dinas Sosial Kota Kupang. Informasi akuntansi manajemen digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas wilayah penerima bantuan, mengevaluasi keberlanjutan program, mengendalikan biaya operasional, serta meminimalisir risiko penyelewengan melalui sistem pengendalian internal, audit trail, dan integrasi data DTKS, SIKS, serta Siskeudes. Keberadaan informasi yang relevan, andal, dan tepat waktu membantu manajemen dalam meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran BLTS. Namun, efektivitas pengambilan keputusan strategis masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakakuratan dan keterlambatan data, keterbatasan literasi digital petugas, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta keterbatasan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem informasi akuntansi manajemen melalui digitalisasi terintegrasi, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan *dashboard real-time*, dan perbaikan kualitas data agar pengambilan keputusan strategis dalam penyaluran BLTS dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Referensi

1. Annisa Mumtahanah, Dhiya Aisy Putri Hendrias, Safira Menayang, & Muhammad Kholif Muhajir Salim, H. M. (2025). Peran Akuntansi Manajerial dalam Pengambilan Keputusan Strategis pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 2(2), 4013–4021. <https://doi.org/10.69714/69qded53>
2. Anthony, R., Govindarajan, V., Hartmann, F., Kraus, K., & Nillson, G. (2014). *Management Control Systems*.
3. Bappenas. (2022). *Evaluasi Program Perlindungan Sosial*.
4. Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*.
5. Hall, M. (2010). *Accounting Information and Managerial Work*.
6. Hood, C. (1991). a Public Management for All Seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
7. Ikhsan Nurfahmi. (2026). Peran Akuntansi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan Strategis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 16–21. <https://doi.org/10.64365/muaranom.v2i1.157>
8. Lapsley, I. (2009). New Public Management: The Cruellest Invention of the Human Spirit? *A Journal Of Accounting, Finance and Business Studies*, 45(1), 1–21. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2009.00275.x>
9. Lubis, W. S., Rahmi, S., & Firdaus, R. (2025). Peran Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan pada Perusahaan Digital: Kajian Literatur dan Studi Kasus Tokopedia & Facebook. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 26(2), 295–300. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v26i2.1527>
10. Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. *Penerbit Andi*.
11. Marpupi, Z., & Darmayanti, C. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Desa Terhadap Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kelurahan Desa Lhung Asan Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya. *Journal Of Social Science Research*, 4(5), 2807–4246.
12. Peters, B. G. (2015). *Advanced Introduction to Public Policy*.
13. Siagian, W., Sinaga, A., Tambunan, E., Manik, A., & Siallagan, H. (2025). Analisis Peran Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Strategis. *Journal Of Social Science*, 5(4), 854–866.
14. Simon, H. . (1997). The new science of management decision. *Prentice Hall*.
15. Simon, R. (1994). Levers of control : how managers use innovative control systems to drive strategic renewal. In *Business*.
16. Speth, J. G. (1997). (Communications Development Incorporated USA, Ed.) Addis Ababa, Ethiopia: *UNDP Governance Policy Paper*.
17. Sumarto. (2020). *Targeting Social Assistance in Indonesia*.
18. Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Yumna, A. (2021). Dinamika penargetan program bantuan sosial di Indonesia selama pandemi COVID-19. *SMERU Research Institute*.
19. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*.